

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputri, A., & Sukesti, F. 2013. Analisis Penerapan *Balanced Scorecard* sebagai Alat Pengukuran Kinerja (Studi Kasus: di BPRS Artha Surya Barokah Semarang). *Jurnal Maksimum*, 4(1): 36-48.
- Agustin, R. D., & Subardjo, A. (2017). Konsep *Value for money* dalam Mengukur Kinerja Pelayanan sektor publik. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(6).
- Ardila, I., & Putri, A. A. (2015). Analisis kinerja keuangan dengan pendekatan *value for money* pada pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 15(1).
- Bastian, Indra. 2014. *Audit Sektor Publik*, Edisi ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Chaeruddin. 2022. Bahas IKPJ, Dewan Pertanyakan Penurunan PAD dan Realisasi Fisik (Online), (<https://daerah.sindonews.com/>, diakses 21 Februari 2023)
- Effendi, T. 2008. *Pengukuran dan Analisis Kinerja Dilingkungan Instansi Pemerintah*. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Jakarta: Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. (2012). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Edisi Pertama. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007*. Jakarta: Salemba Empat
- Kadir, A. 2009. *Implikasi Prinsip Value for Money terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tojo Una una*. Tesis. Palu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako
- Kariyoto, K. 2017. Implementasi *Value for Money, Input Output Outcome* dan Best Value Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Sektor Publik. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*. 11(1): 72-82.
- Lestari, P. I., & Shara, Y. 2021. Pengaruh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal In Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*. 2(1): 345-359.
- Lukito, P., 2014. *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi ke Depan*. Jakarta: Grasindo.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UUP STIM YKPN
- Mahmudi, Prima Pundi Redana. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohammad. 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andy Offset.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andy Offset.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang “*Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*”
- Polii, I. R., Saerang, D. P., & Tangkuman, S. J. 2020. Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep *Value for Money*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 8(4).
- Rohman, A., Daud, R., & Ubaidillah. 2019. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Profita: Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan*, 12(1): 28-49.
- Rudiansah, Muhammad Fandi, 2021. *Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Konsep Value for Money di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung tahun 2018 - 2020*. Tesis. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Rusdi, 2018. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sangin, I. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus Kantor BPKAD Kota Palopo)* Disertasi. Palopo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah.
- Sony Yuwono, dkk. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Edisi Pertama, Malang: Bayumedia Publishing.
- Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2010
- Sujarweni Wiratna, 2015. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sujarweni, V. Wiratna. 2017. *Analisis laporan Keuangan Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta.
- Sulisworo, D. 2009. *Pengukuran Kinerja*. Universitas Ahmad Dahlan.
- Syadiyah, K. (2016). Analisis *value for money* dalam pengukuran kinerja keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo. E-

Journal Akuntansi" EQUITY", 2(4).

Syamsu, A. M. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo Sebelum dan Setelah Kebijakan Refocusing Anggaran*. Disertasi. Palopo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah.

Treasury, H.M.S. (2006). *Value for Money assessment guidance*. UK Government.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang "Pemerintahan Daerah".

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 tentang "Pemerintah Daerah".

Waney, C., Saerang, D., & Alexander, S. 2018. Analisis realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2): 334-341.

Wuwungan, G. T., Tinangon, J., & Rondonuwu, S. (2019). Penerapan Metode *Value for money* Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Organisasi Sektor Publik Di Dinas Kesehatan Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata**BIODATA****Identitas Diri**

Nama : Riyan Fadilah Putra
Tempat, Tanggal Lahir : Bua, 10 Juli 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Rumah : Jl. Muntalaka, Bua, Kabupaten Luwu
Telpon Rumah dan Hp : 082271627307
Alamat E-mail : ryanfadilah14@@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. SDN 66 Dangkang
2. SMPN 3 Palopo
3. SMAN 1 Palopo

Pendidikan Nonformal

1. Tahun 2019: Pelatihan Basic Learning Skills, Character & Creativity (BALANCE) Universitas Hasanuddin.
2. Tahun 2020: Bina Kader Mahasiswa Akuntansi (LK 1)

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMA FEB UH)
2. Pengurus Departemen Propaganda Media Senat Mahasiswa FEB UH periode 2021-2022.

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, 18 Juli 2023



Riyan Fadilah Putra

Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Meneliti



PEMERINTAH KOTA PALOPO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Andi Djemma No.139 Telp.(0471) 327458 – Fax. (0471) 22320 Palopo

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800.1.4.1/1009 /BPKAD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRFAN DAHRI, S.TP.,M.Si
 Jabatan : Kepala BPKAD Kota Palopo

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RIYAN FADILAH PUTRA
 Nim : A031191048
 Program Studi : Akuntansi
 Universitas : Universitas Hasanuddin
 Surat Izin Penelitian : No. 477/IP/DPMPSTSP/IV/2023

Telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data Pada **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo** dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO DENGAN PENDEKATAN VALUE FOR MONEY"** terhitung tanggal 17 April s.d 26 April 2022

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 April 2023



Tembusan : Kepada Yth.

1. Walikota Palopo (sebagai laporan) ;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Palopo, di Palopo

Lampiran 3. Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KOTA PALOPO
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	JUMLAH	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	RUPIAH	%
1	2	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	1,005,856,128,898.00	984,500,257,290.51	(21,355,871,607.49)	97.88
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	169,497,871,831.00	165,664,354,780.08	(3,833,517,050.92)	97.74
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	34,725,000,000.00	34,860,944,165.02	135,944,165.02	100.39
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	17,990,922,024.00	9,074,168,785.55	(8,916,753,238.45)	50.44
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,496,932,396.00	7,496,932,396.00	-	100.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	109,285,017,411.00	114,232,309,433.51	4,947,292,022.51	104.53
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	802,172,813,067.00	783,143,902,367.43	(19,028,910,699.57)	97.63
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/	11,198,909,000.00	8,223,532,627.00	(2,975,376,373.00)	73.43
1.2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	7,555,899,000.00	4,886,273,038.00	(2,669,625,962.00)	64.67
1.2.3	Dana Alokasi Umum	537,722,702,000.00	537,722,702,000.00	-	100.00
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	185,114,563,052.00	176,009,559,957.00	(9,105,003,095.00)	95.08
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	#DIV/0!
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	60,580,740,015.00	56,301,834,745.43	(4,278,905,269.57)	92.94
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	34,185,444,000.00	35,692,000,143.00	1,506,556,143.00	104.41
1.3.1	Pendapatan Hibah	19,177,800,000.00	20,449,560,150.00	1,271,760,150.00	106.63
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
1.3.3	pendapatan lainnya	15,007,644,000.00	15,242,439,993.00	234,795,993.00	101.56
2	BELANJA	1,008,057,603,046.00	956,451,857,030.35	(51,605,746,015.65)	94.88
2.1	BELANJA OPERASI	784,029,146,603.00	757,838,851,527.94	(26,190,295,075.06)	96.66
2.1.1	Belanja Pegawai	463,224,499,173.00	454,386,365,106.00	(8,838,134,067.00)	98.09
2.1.2	Belanja Barang	292,482,843,010.00	279,349,550,120.04	(13,133,292,889.96)	95.51
2.1.3	Belanja Bunga	2,196,367,000.00	2,175,102,608.90	(21,264,391.10)	99.03
2.1.4	Belanja Hibah	22,032,785,420.00	18,259,315,124.00	(3,773,470,296.00)	82.87
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4,092,652,000.00	3,668,518,569.00	(424,133,431.00)	89.64
2.2	BELANJA MODAL	223,028,456,443.00	198,613,005,502.41	(24,415,450,940.59)	89.05
2.2.1	Belanja Tanah	9,850,000,000.00	2,701,941,428.00	(7,148,058,572.00)	27.43
2.2.2	Belanja Peralatan dan mesin	55,598,481,609.00	52,489,544,013.93	(3,108,937,595.07)	94.41
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	63,948,473,024.00	58,883,227,110.02	(5,065,245,913.98)	92.08
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	88,406,661,120.00	79,667,296,510.46	(8,739,364,609.54)	90.11
2.2.5	Belanja Aset Tetap lainnya	5,224,840,699.00	4,870,996,440.00	(353,844,259.00)	93.23
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	1,000,000,000.00	-	(1,000,000,000.00)	-
2.3.1	Belanja Tak Terduga	1,000,000,000.00	-	(1,000,000,000.00)	-
SURPLUS / (DEFISIT)		(2,201,474,148.00)	28,048,400,260.16	30,249,874,408.16	(1,274.07)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	2,201,474,148.00	6,001,476,019.10	3,800,001,871.10	272.61
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	5,142,849,148.00	51,517,849,148.34	46,375,000,000.34	1,001.74
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	5,142,849,148.00	5,142,849,148.34	0.34	100.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	46,375,000,000.00	46,375,000,000.00	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	#DIV/0!
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2,941,375,000.00	45,516,373,129.24	42,574,998,129.24	1,547.45
3.2.2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	#DIV/0!
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	2,941,375,000.00	45,516,373,129.24	42,574,998,129.24	1,547.45
3.2.5	Pembayaran Hutang Belanja	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO		2,201,474,148.00	6,001,476,019.10	3,800,001,871.10	272.61
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		0.00	34,049,876,279.26	34,049,876,279.26	0.00



Laporan Realisasi Anggaran 2020



PEMERINTAH KOTA PALOPO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2020

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)
1	PENDAPATAN	969,562,250,067.00	969,408,934,593.27	99.98
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	173,393,617,952.00	177,205,052,456.65	102.20
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	33,028,000,000.00	34,031,809,461.00	103.04
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	8,883,482,000.00	8,880,154,097.48	99.96
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6,801,973,147.00	6,801,973,147.00	100.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	124,680,162,805.00	127,491,115,751.17	102.25
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	722,714,224,702.00	719,692,245,075.62	99.58
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	669,756,718,109.00	665,583,965,763.00	99.38
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	11,519,935,000.00	13,443,569,762.00	116.70
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	4,553,081,000.00	4,935,824,731.00	108.41
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	498,865,870,000.00	497,008,966,000.00	99.63
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	154,817,832,109.00	150,195,605,270.00	97.01
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	52,957,506,593.00	54,108,279,312.62	102.17
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	46,715,623,393.00	46,443,640,112.62	99.42
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	6,241,883,200.00	7,664,639,200.00	122.79
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	73,454,407,413.00	72,511,637,061.00	98.72
1.3.1	Pendapatan Hibah	66,470,610,413.00	65,516,179,506.00	98.56
1.3.3	Pendapatan Lainnya	6,983,797,000.00	6,995,457,555.00	100.17
2	BELANJA	1,094,240,116,346.00	943,885,796,203.19	86.26
2.1	BELANJA OPERASI	759,432,688,244.00	727,073,776,201.30	95.74
2.1.1	Belanja Pegawai	477,995,368,759.00	461,615,137,670.00	96.57
2.1.2	Belanja Barang	259,463,982,310.00	249,419,814,472.86	96.13
2.1.3	Belanja Bunga	3,626,200,100.00	2,053,411,769.44	56.63
2.1.5	Belanja Hibah	14,812,544,585.00	10,674,874,249.00	72.07
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3,534,592,490.00	3,324,092,490.00	94.04
2.2	BELANJA MODAL	325,870,177,102.00	207,967,903,780.89	63.82
2.2.1	Belanja Tanah	3,705,545,640.00	1,715,421,840.00	46.29
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	96,409,439,472.00	90,780,286,142.70	94.16
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	152,012,167,549.00	46,270,043,433.00	30.44
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	71,411,648,041.00	66,887,292,886.19	93.66
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2,331,376,400.00	2,314,859,479.00	99.29
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	8,937,251,000.00	8,844,116,221.00	98.96
2.3.1	Belanja Tak Terduga	8,937,251,000.00	8,844,116,221.00	98.96
	SURPLUS / (DEFISIT)	(124,677,866,279.00)	25,523,138,390.08	(20.46)
3	PEMBIAYAAN			
3.1	PENERIMAAN DAERAH	191,519,241,279.00	70,649,876,279.26	36.89
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	34,049,876,279.00	34,049,876,279.26	100.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	157,469,365,000.00	36,600,000,000.00	23.24
3.2	PENGELUARAN DAERAH	66,841,375,000.00	49,341,373,129.24	73.82
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	66,841,375,000.00	49,341,373,129.24	73.82
	PEMBIAYAAN NETTO	124,677,866,279.00	21,308,503,150.02	17.09
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0.00	46,831,641,540.10	0.00

Palopo, 1 Januari 2020


 Walikota Palopo
 Drs. H. M. Judas Amir, MH.


Laporan Realisasi Anggaran 2021



PEMERINTAH KOTA PALOPO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	957,596,278,224.00	0.00	936,589,797,578.17	936,589,797,578.17	(21,006,480,645.83)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	153,896,341,415.00	0.00	140,133,041,613.17	140,133,041,613.17	(13,763,299,801.83)
4.1.1	Pajak Daerah	41,022,700,000.00	0.00	35,622,582,580.00	35,622,582,580.00	(5,400,117,420.00)
4.1.2	Retribusi Daerah	11,023,002,200.00	0.00	11,587,793,535.64	11,587,793,535.64	564,791,335.64
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,684,839,685.00	0.00	7,799,016,092.00	7,799,016,092.00	114,176,407.00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	94,165,799,530.00	0.00	85,123,649,405.53	85,123,649,405.53	(9,042,150,124.47)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	777,737,136,809.00	0.00	770,932,817,337.00	770,932,817,337.00	(6,804,319,472.00)
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	723,505,013,307.00	0.00	722,950,633,455.00	722,950,633,455.00	(554,379,852.00)
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54,232,123,502.00	0.00	47,982,183,882.00	47,982,183,882.00	(6,249,939,620.00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	25,962,800,000.00	0.00	25,523,938,628.00	25,523,938,628.00	(438,861,372.00)
4.3.1	Pendapatan Hibah	5,172,000,000.00	0.00	5,203,692,128.00	5,203,692,128.00	31,692,128.00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20,790,800,000.00	0.00	20,320,246,500.00	20,320,246,500.00	(470,553,500.00)
5	BELANJA DAERAH	1,001,572,261,730.00	0.00	935,475,348,254.12	935,475,348,254.12	(66,096,913,475.88)
5.1	BELANJA OPERASI	768,633,962,391.00	0.00	728,746,015,160.19	728,746,015,160.19	(39,887,947,230.81)
5.1.1	Belanja Pegawai	462,110,345,217.00	0.00	450,043,897,859.00	450,043,897,859.00	(12,066,447,358.00)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	292,869,315,688.00	0.00	268,500,193,172.79	268,500,193,172.79	(24,369,122,515.21)
5.1.3	Belanja Bunga	1,650,000,000.00	0.00	1,610,625,638.40	1,610,625,638.40	(39,374,361.60)
5.1.5	Belanja Hibah	9,773,378,490.00	0.00	6,385,683,490.00	6,385,683,490.00	(3,387,695,000.00)
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2,230,922,996.00	0.00	2,205,615,000.00	2,205,615,000.00	(25,307,996.00)
5.2	BELANJA MODAL	230,938,299,339.00	0.00	206,729,333,093.93	206,729,333,093.93	(24,208,966,245.07)
5.2.1	Belanja Modal Tanah	4,150,000,000.00	0.00	3,637,550,405.00	3,637,550,405.00	(512,449,595.00)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52,480,471,969.00	0.00	50,560,379,782.00	50,560,379,782.00	(1,920,092,187.00)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	142,341,417,583.00	0.00	122,402,791,826.93	122,402,791,826.93	(19,938,625,756.07)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30,329,861,249.00	0.00	28,544,485,957.00	28,544,485,957.00	(1,785,375,292.00)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,636,548,538.00	0.00	1,584,125,123.00	1,584,125,123.00	(52,423,415.00)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000,000.00)
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000,000.00)
	SURPLUS / DEFISIT	(43,975,983,506.00)	0.00	1,114,449,324.05	1,114,449,324.05	45,090,432,830.05
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	51,117,358,506.00	0.00	48,531,641,540.10	48,531,641,540.10	(2,585,716,965.90)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	46,917,358,506.00	0.00	46,831,641,540.10	46,831,641,540.10	(85,716,965.90)
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	4,200,000,000.00	0.00	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00	(2,500,000,000.00)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7,141,375,000.00	0.00	4,641,373,129.24	4,641,373,129.24	(2,500,001,870.76)
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	7,141,375,000.00	0.00	4,641,373,129.24	4,641,373,129.24	(2,500,001,870.76)
	PEMBIAYAAN NETTO	43,975,983,506.00	0.00	43,890,268,410.86	43,890,268,410.86	(85,715,095.14)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	0.00	45,004,717,734.91	45,004,717,734.91	45,004,717,734.91

Wakil Kota Palopo

 Drs. H. M. Judas Amir, MH.